



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI VI DPR RI BIDANG : INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN,
INVESTASI, STANDARDISASI, BP BATAM, DAN BPKS SABANG**

Tahun Sidang	:	2014-2015
Masa Persidangan	:	II
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja
Sifat Rapat	:	Terbuka
Rapat ke	:	61 (Enam Puluh Satu)
Hari/Tanggal	:	Selasa – Rabu (10 – 11 Februari 2015)
W a k t u	:	Pukul 20.15 s.d 02.05 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VI DPR RI
Ketua Rapat	:	Ir. H. Achmad Hafisz Tohir (Ketua Komisi VI DPR RI/F-PAN) didampingi : 1. Dodi Reza Alex Noerdin, Lic.Econ, MBA (Wk. Ketua Komisi VI DPR RI/F-PG). 2. Heri Gunawan, SE, MBA (Wk. Ketua Komisi VI DPR RI/ F-PGERINDRA). 3. Ir. H. Azam Azman Natawijana (Wk. Ketua Komisi VI DPR RI/F-PD). 4. DR. IR. HM. Farid Al-Fauzi, MMT (Wk. Ketua Komisi VI DPR RI/F-PHANURA).
Sekretaris Rapat	:	Wahyu Prameswari, SH, M.Si (Kabagset. Komisi VI DPR RI)
A c a r a	:	1. Pengantar Ketua Rapat. 2. Pembahasan Tunjangan Kinerja Kementerian BUMN RI pada RAPBN-P Tahun 2015 3. Persetujuan dan PMN pada RAPBN-P Tahun 2015 4. Penutup.
Hadir	:	A. 48 dari 48 Anggota Komisi VI DPR RI. B. Menteri BUMN didampingi para Deputi BUMN beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Kerja (Lanjutan) antara Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN RI beserta jajarannya dibuka pada pukul 20.15 WIB, dan rapat dinyatakan tertutup kemudian diakhiri dengan Rapat Terbuka untuk umum.
2. Ketua rapat menginformasikan bahwa agenda Rapat Kerja hari ini membahas RAPBN-P dan pengambilan keputusan terhadap PMN pada BUMN Tahun Anggaran 2015.

3. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Menteri BUMN RI untuk menanggapi hasil Rapat Panja PMN Tahun 2015 termasuk temuan, pertimbangan-pertimbangan, dan catatan-catatan terhadap BUMN yang direncanakan mendapat PMN Tahun 2015 yang selanjutnya untuk mengambil keputusan.

II. KESIMPULAN

1. Komisi VI DPR RI dapat menyetujui Anggaran Kementerian BUMN RI Tahun 2015 yang belum termasuk Anggaran Tunjangan Kinerja Tahun 2015 yang saat ini dianggarkan oleh Menteri Keuangan RI pada Mata Anggaran 0999 sebesar **Rp14.262.521.000 (Empat Belas Miliar Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah)** yang pada APBN-P 2015 akan dialihkan menjadi anggaran Kementerian BUMN, selanjutnya untuk disampaikan ke Badan Anggaran DPR RI sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Komisi VI DPR RI dapat menyetujui sebagian usulan Penyertaan Modal Negara pada BUMN-BUMN dalam RAPBN-P Tahun Anggaran 2015 dengan catatan :
 - (1) Merekomendasikan kepada Menteri BUMN tindak lanjut dan penyelesaian temuan BPK RI untuk 14 BUMN, yaitu PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, PT Angkasa Pura II (Persero), PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), PT Garam (Persero), PT Pindad (Persero), PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero), PT Kereta Api Indonesia (Persero), Perum Perumnas, PT Perikanan Nusantara (Persero), PT Sang Hyang Seri (Persero), Perum Perikanan Indonesia, PT Perkebunan Nusantara IX, PT Perkebunan Nusantara X, dan Perum Bulog.
 - (2) Merekomendasikan kepada Kementerian BUMN RI untuk meningkatkan fungsi pembinaan kepada BUMN Penerima PMN untuk memenuhi pengaturan dan tata kelola keuangan yang baik sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
 - (3) PMN tidak digunakan untuk membayar hutang Perusahaan Penerima PMN.
 - (4) Pelaksanaan *Right Issue* tidak mengurangi komposisi kepemilikan saham pemerintah saat ini pada BUMN terkait.
 - (5) Penggunaan PMN dilakukan dan dicatat dalam rekening terpisah.
 - (6) BUMN penerima PMN harus menerapkan Good Corporate Governance (GCG).
 - (7) Perlu pengawasan secara ketat atas penggunaan PMN agar sesuai dengan rencana bisnis dan perubahannya yang diajukan kepada Komisi VI DPR RI dalam Rapat Kerja dengan Menteri BUMN RI.
 - (8) Komisi VI DPR RI akan melakukan pengawasan terhadap Penggunaan PMN BUMN tersebut.
 - (9) Dalam hal pengadaan barang dan jasa dan dalam penggunaan dana PMN meminta kepada Kementerian BUMN untuk mengutamakan produk-produk dalam negeri, dan bersinergi dengan BUMN-BUMN.
 - (10) Dalam melaksanakan PMN, Kementerian BUMN RI sebagai Pembina BUMN diminta untuk memperhatikan catatan-catatan sebagai bagian yang tidak terpisahkan yang telah disampaikan dalam Rapat Kerja antara Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN RI tanggal 10 s.d.11 Februari 2015 yang membahas persetujuan PMN Tahun 2015 sebagaimana terlampir.

3. Komisi VI DPR RI menyetujui besaran PMN, pada BUMN dalam RAPBN-P Tahun Anggaran 2015 untuk disampaikan ke Badan Anggaran DPR RI sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

NO	BUMN	DALAM RUPIAH
1.	PT. Angkasa Pura II (Persero)	2.000.000.000.000
2.	PT. ASDP (Persero)	1.000.000.000.000
3.	PT. PELNI (Persero)	500.000.000.000
4.	PT. Djakarta Lloyd (Persero)	0
5.	PT. Utama Karya (Persero)	3.600.000.000.000
6.	Perum Perumnas	2.000.000.000.000
7.	PT. Waskita Karya (Persero) Tbk	3.500.000.000.000
8.	PT. Adhi Karya (Persero) Tbk	1.400.000.000.000
9.	PT. Perkebunan Nusantara III (Persero)	3.500.000.000.000
10	PT. Perkebunan Nusantara VII	0
11	PT. Perkebunan Nusantara IX	0
12	PT. Perkebunan Nusantara X	0
13	PT. Perkebunan Nusantara XI	0
14	PT. Perkebunan Nusantara XII	0
15	PT. Permodalan Nasional Madani (Persero)	1.000.000.000.000
16	PT. Garam (Persero)	300.000.000.000
17	PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	0
18	Perum Bulog	3.000.000.000.000
19	PT. Pertani (Persero)	470.000.000.000
20	PT. Sang Hyang Seri (Persero)	400.000.000.000
21	PT. Perikanan Nusantara (Persero)	200.000.000.000
22	Perum Perikanan Indonesia	300.000.000.000
23	PT. Dirgantara Indonesia (Persero)	400.000.000.000
24	PT. Dok Dan Perkapalan Surabaya (DPS) (Persero)	200.000.000.000
25	PT. Dok Dan Perkapalan Kodja Bahari (DKB) (Persero)	900.000.000.000
26	PT. Industri Kapal Indonesia (Persero)	200.000.000.000
27	PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk	3.500.000.000.000
28	PT. Pindad (Persero)	700.000.000.000
29	PT. Kereta Api Indonesia (Persero)	2.750.000.000.000
30	PT. Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	2.000.000.000.000
31	PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)	250.000.000.000
32	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk	0
33	PT. Pelindo IV (Persero)	2.000.000.000.000
34	PT. Krakatau Steel (Persero) (<i>non cash</i>)	956.000.000.000
35	PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) (<i>non cash</i>).	250.000.000.000
JUMLAH		37.276.000.000.000
<i>(Tiga Puluh Tujuh Triliun Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Miliar Rupiah)</i>		

Catatan :

PMN pada PTPN III (Persero) dialokasikan dan dilaksanakan pada Tahun 2015 untuk PTPN sebagai berikut :

NO	BUMN	JUMLAH
1	PTPN VII	175.000.000.000
2	PTPN IX	1000.000.000.0000
3	PTPN X	975.000.000.000
4	PTPN XI	650.000.000.000
5	PTPN XII	700.000.000.000
JUMLAH		3.500.000.000.000
<i>(Tiga Triliun Lima Ratus Juta Rupiah)</i>		

III. PENUTUP

Rapat ditutup, Rabu, 11 Februari 2015 pada pukul 02.05 WIB